

BAB V

KESIMPULAN

Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja masih menimbulkan persoalan, yaitu masih adanya dampak berkelanjutan akibat terjadinya kedua pelanggaran HAM berat tersebut. Upaya untuk menyelesaikan dampak dari pelanggaran HAM berat tersebut ditelaah melalui teori-teori tentang rekonsiliasi dalam kerangka keadilan transisional. Kerangka keadilan transisional menjadi relevan untuk diteliti mengingat kedua negara sama-sama menerapkan konsep keadilan transisional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Mengingat keadilan transisional dalam penelitian ini dipandang sebagai sesuatu yang interdisipliner, maka penelitian ini tidak hanya mencoba mengidentifikasi faktor-faktor hukum, melainkan juga faktor-faktor non-hukum.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, dapat disimpulkan terdapat faktor-faktor non legal yang menyebabkan proses rekonsiliasi pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja belum selesai. Pertama, keadilan transisional sebagai suatu pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada rezim sebelumnya belum tentu pelaksanaannya berhasil. Implementasi keadilan transisional di Indonesia dan Kamboja bergantung kepada *political will* dari negara tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah Indonesia dan Kamboja yang bersikap resisten terhadap upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan merupakan penghambat terjadinya rekonsiliasi. Hal ini juga terbukti dari bagaimana negara Indonesia dan Kamboja sama-sama memiliki landasan hukum berupa landasan konstitusional yang kemudian dibentuk peraturan mengenai mekanisme keadilan transisional. Meskipun demikian, negara Indonesia gagal melaksanakan mekanisme keadilan transisional tersebut. Pada sisi lain, ECCC yang merupakan entitas tersendiri berhasil melaksanakan pengadilan pidana terhadap 2 (dua) petinggi rezim Khmer Rouge menunjukkan keterlibatan langsung PBB memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap ditegakkannya *rule of law*.

Kedua, terbentuknya memori kolektif dan pencarian kebenaran merupakan prasyarat terjadinya rekonsiliasi. Artinya, tanpa pencarian kebenaran dan terbentuknya memori kolektif, tidak mungkin terjadi rekonsiliasi. Perbedaan tampak pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Warga Kamboja sepakat bahwa apa yang terjadi selama masa pemerintahan Khmer Rouge merupakan suatu kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat. Faktor PRT dan museum genosida Tuol Sleng juga merupakan faktor signifikan terbentuknya suatu memori kolektif. Sementara itu, memori kolektif belum terbentuk di Indonesia. Stigmatisasi berkelanjutan terhadap korban, keluarga korban, dan kerabat korban membuat korban mengalami viktimisasi. Hal ini disebabkan kebenaran versi negara mengenai peristiwa G30S masih terus digaungkan dan negara masih resisten terhadap versi lain dari G30S.

Ketiga, rekonsiliasi yang diinisiasi oleh NGO dan aktor agama merupakan respon terhadap ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan pemerintah Indonesia dan Kamboja untuk menginisiasi rekonsiliasi. Memang benar rekonsiliasi yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan aktor agama jangkauannya terbatas, tetapi bukan berarti usaha tersebut tidak berperan dalam proses rekonsiliasi. Permasalahannya adalah pemerintah Indonesia dan Kamboja tidak menunjukkan komitmennya untuk mendukung rekonsiliasi yang diinisiasi oleh NGO dan aktor agama.

Keempat, dinamika antara aktor yang terlibat dalam proses rekonsiliasi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan penelitian tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara berpengaruh besar dalam terjadi atau tidak terjadinya rekonsiliasi. Pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966, aktor agama mayoritas di Indonesia yang masih belum seragam dalam mengupayakan rekonsiliasi menjadi faktor penghambat terjadinya rekonsiliasi di akar rumput. Pada Kamboja, ECCC sebagai aktor unik karena perannya bukan sebagai entitas negara, tetapi memiliki otoritas untuk mengadili dan memberikan reparasi merupakan faktor pendukung rekonsiliasi di Kamboja.

Berdasarkan keempat poin di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini telah berhasil dijawab. Bahwa memori kolektif dan pencarian kebenaran, dinamika

aktor dalam rekonsiliasi, rekonsiliasi dalam tataran *grass roots*, serta aspek normatif dalam keadilan transisional memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Faktor yang selalu berpengaruh dalam keempat hal tersebut adalah faktor dinamika aktor politik, termasuk aktor negara. Faktor politik berarti bagaimana dinamika rekonsiliasi perlu dilihat bukan hanya dari perspektif hukum, melainkan juga perspektif politik. Penemuan penting dari penelitian ini adalah apabila pelaku pelanggaran HAM berat rezim terdahulu masih memperoleh kekuasaan di rezim setelahnya, maka rezim setelahnya memiliki kecenderungan untuk menghambat jalannya keadilan transisional. Hal ini juga sekaligus membuka perdebatan mengenai apakah dalam melakukan penelitian tentang rekonsiliasi, hukum dapat dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai. Pada sisi lain, penelitian ini berhasil menjelaskan bahwa *political will* dari negara untuk menjalankan keadilan transisional merupakan alasan utama mengapa rekonsiliasi di Indonesia dan Kamboja untuk kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 dan 1975-1979 belum selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea

Perjanjian Internasional

Rome Statute of the International Criminal Court

Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the prosecution under Cambodian Law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea

Deklarasi, Resolusi, dan Laporan Organisasi Internasional

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 60/147. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. 16 Desember 2005.

Laporan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/2004/616. *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*. 23 Agustus 2004.

Laporan Komisi Hak Ekonomi dan Sosial PBB, Diane Orentlicher. *Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*, 8 Februari 2005.

Buku

- Alexander Laban Hinton. *Man or Monster: the Trial of a Khmer Rouge Torturer*. Duke University Press. Durham. 2016.
- Alexander Laban Hinton. *The Justice Facade: Trials of Transition in Cambodia*. Oxford University Press. Oxford. 2018.
- Amurwani Dwi L. *Suara Mereka yang Kembali dan Dikembalikan: Kisah Eks Tapol Perempuan*. Kompas. Jakarta. 2023.
- Anja Mihr. *An Introduction to Transitional Justice* dalam Olivera Simic (ed.). *An Introduction to Transitional Justice Second Edition*. Routledge. New York. 2021.
- Ben Kiernan. *Genocide and Resistance in Southeast Asia*. Routledge. London. 2008.
- Ben Kiernan. *Mass Murder and Genocide in Indonesia and Cambodia, 1965-79: Cold War, State, and Region* dalam David J. Simon dan Leora Khan (ed.), *Handbook of Genocide Studies*. Edward Elgar Publishing. Cheltenham. 2023.
- Ben Kiernan. *The Genocide in Cambodia, 1975-1979* dalam Ben Kiernan (ed.), *The Cambridge World History of Genocide*. Cambridge University Press. Cambridge. 2023.
- Daniel Bar-Tal. *Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace* dalam Joseph de Rivera (ed.). *Handbook on Building Cultures of Peace*. (Springer. Bournemouth. 2009.
- David A. Crocker. *Reckoning with Past Wrongs: A Normative Framework* dalam Carol A. L., Prager, dan Trudy Govier (ed.). *Dilemmas of Reconciliation: Cases and Concepts*. Wilfrid Laurier University Press. Waterloo. 2003.
- David Bloomfield, Teres Barnes, dan Luc Huyse (ed.), *Reconciliation after Violent Conflict*. International Institute for Democracy and Electronic Assistance. Stockholm. 2003.
- David Chandler. *Voices from S-21: Terror and History in Pol Pot's Secret Prison*. University of California Press. Berkeley. 1999.
- Desmond Tutu. *No Future Without Forgiveness*. Doubleday. New York. 1999.

- Edward Aspinall. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press. Stanford. 2005.
- Evan Gottesman. *Cambodia after the Khmer Rouge: Inside the Politics of Nation Building*. Yale University Press. New Haven. 2003.
- George Mousourakis. *Comparative Law and Legal Traditions Historical and Contemporary*. Springer. Cham. 2019.
- Giada Girelli. *Understanding Transitional Justice: A Struggle for Peace, Reconciliation, and Rebuilding*. Palgrave Macmillan. Cham. 2017.
- John Roosa. *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia*. University of Wisconsin Press. Madison. 2020.
- Marcos Zunino. *Justice Framed A Genealogy of Transitional Justice*. Cambridge University Press. Cambridge. 2019.
- Margaret Urban Walker. *Making Reparation Possible: Theorizing Reparative Justice* dalam Claudio Corradetti, Nir Eisikovits, dan Jack Volpe Rotondi (ed.). *Theorizing Transitional Justice*. Routledge. New York. 2015.
- Melissa S. Williams dan Rosemary Nagy. *Introduction* dalam Melissa S. Williams, Rosemary Nagy, dan Jon Elster (ed.). *Transitional Justice*. New York University Press. New York. 2012.
- M. Cherif Bassiouni. *Introduction to International Criminal Law: Second Revised Edition 22-23*. Martinus Nijhoff Publisher. Leiden. 2014.
- Naomi Roht-Arriaza. *The New Landscape of Transitional Justice* dalam Naomi Roht-Arriaza dan J. Mariezcurrena (ed.), *Transitional Justice in the Twenty-First Century 2*. Cambridge University Press. New York. 2006.
- Nevin T. Aiken. *Identity, Reconciliation and Transitional Justice: Overcoming Intractability in Divided Societies* 14-15. Routledge. New York. 2013.
- Pablo de Greiff. *Theorizing Transitional Justice* dalam Melissa S. Williams, Rosemary Nagy, dan Jon Elster (ed.). *Transitional Justice*. New York University Press. New York. 2012.
- Patrick Burgess dkk. *Transitional Justice Handbook*. Asia Justice and Human Rights dan the Transitional Justice Asia Network. Bali. 2023.

- Paul Seils. *The Place of Reconciliation in Transitional Justice Conceptions and Misconceptions*. ICTJ Briefing Paper. Juni 2017.
- Priscilla B. Hayner. *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions* 220. Routledge. New York. 2011.\
- Robert Cribb. *The Indonesian Killings 1965-1966, Studies from Java and Bali*. Monash University Press. Victoria. 1990.
- Samar El-Masri, Tammy Lambert, dan Jonna R. Quinn. *Changing the Context: Can Conditions Be Created That are More Conducive to Transitional Justice Success?* dalam Samar El. Masri, dkk. (ed.) *Transitional Justice in Comparative Perspectives Preconditions for Success*. Palgrave Macmillan. Cham. 2020.
- Saskia E. Wieringa dan Nursyahbani Katjasungkana. *Propaganda and Genocide in Indonesia Imagined Evil*. Routledge. New York. 2019.
- Soth Plai Ngarm. *Cambodian Reconciliation: A Reflection on Justice and Reconciliation Issues and Challenges for the Past 25 Years Post War - Peace and Reconciliation*. Centre for Peace and Conflict Studies. Siem Reap. 2017.
- Vanessa Hearman. *Antara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perjuangan Meraih Keadilan Setelah Kekerasan Massal Tahun 1965 di Indonesia* dalam Ward Berenschot dan Gerry Van Klinken (ed.). *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2019.
- Vanessa Hearman. *The 1965-1966 Violence, Religious Conversions and the Changing Relationship Between the Left and Indonesia's Churches* dalam Katharine McGregor, Jess Melvin, dan Annie Pohlman (ed.). *The Indonesian Genocide 1965: Causes, Dynamics and Legacy*. Palgrave Macmillan. Cham. 2017.
- Yati Andriyani dkk. *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*. International Center for Transitional Justice dan KontraS. Jakarta. 2011.

Yos Hut Khemacaro. *Steering the Middle Path: Buddhism, Non-Violence and Political Change in Cambodia*. Conciliation Resources. London. 1998.

Jurnal

Adam Kochanski. *Framing, Truth-telling, and the Limits of Local Transitional Justice*. 47 *Review of International Studies* 468. 2021.

Alina Balta, Manon Bax, dan Rianne Letschert. *Between Idealism and Realism: A Comparative Analysis of the Reparations Regimes of the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*. 45 *International Journal of Comparative Applied Criminal Justice* 15. 2021.

Atnike Nova Sigiro. *Jalan Kecil Keadilan Transisi: Program Bantuan Medis bagi Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*. 38 *Jurnal Prisma* 20. 2019.

Christoph Sperfeldt. *Cambodian Civil Society and the Khmer Rouge Tribunal*. 6 *International Journal of Transitional Justice* 149. 2012.

David Wippman. *Atrocities, Deterrence, and the Limits of International Justice*. 23 *Fordham International Law Journal* 473. 1999.

Dustin N. Sharp. *Addressing Dilemmas of the Global and the Local in Transitional Justice*. 29 *Emory International Law Review* 71. 2014.

Elin Skaar. *Reconciliation in a Transitional Justice Perspective*. 1 *Transitional Justice Review* 54. 2012.

Ellen Emilie Stensrud. *New Dilemmas in Transitional Justice: Lessons from the Mixed Courts in Sierra Leone and Cambodia*. 46 *Journal of Peace Research* 1. 2009.

Eric A. Posner. *Transitional Justice as Ordinary Justice*. 117 *Harvard Law Review* 762. 2003.

Frank Haldemann. *Another King of Justice: Transitional Justice as Recognition*. 41 *Cornell International Law Journal* 675. 2008.

Jorg Menzel. *Justice Delayed or Too Late for Justice? The Khmer Rouge Tribunal and the Cambodian "Genocide" 1975-79*. 9 *Journal of Genocide Research* 215. 2007.

- Makau Mutua. *What is the Future of Transitional Justice*. 9 *International Journal of Transitional Justice* 1. 2015.
- Maja Davidovic. *The Law of 'Never Again': Transitional Justice and the Transformation of the Norm of Non-Recurrence*. 15 *International Journal of Transitional Justice* 386. 2021.
- Maria Elander. *The Victim's Address: Expressivism and the Victim at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*. 7 *International Journal of Transitional Justice* 95. 2012.
- Mary S. Zurbuchen. *History, Memory, and the "1965 Incident" in Indonesia*. 42 *Asian Survey* 564. 2002.
- Michael Vickery. *Cambodia (Kampuchea): History, Tragedy, and Uncertain Future*. 21 *Bulletin of Concerned Asian Scholar* 35. 1998.
- Natasha Naidu dan Sarah Williams. *The Function and Dysfunction of the Pre-Trial Chamber at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*. 18 *Journal of International Criminal Justice* 665. 2020.
- Karen Engle. *Anti-Impunity and the Turn of Criminal Law in Human Rights*. 100 *Cornell Law Review* 1069. 2014.
- Kerry Clamp dan Jonathan Doak. *More than Words: Restorative Justice Concepts in Transitional Justice Settings*. 12 *International Criminal Law Review* 339. 2012.
- Mark van Hoecke dan Mark Warrington. *Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Toward a New Model for Comparative Law*. 47 *International and Comparative Law Quarterly* 495. 1998.
- Naomi Roht-Arriaza. *Combating Impunity: Some Thoughts on the Way Forward*, 59 *Law and Contemporary Problems* 93. 1996
- Oskar N.T. Thoms, James Ron, dan Roland Paris. *State-Level Effects of Transitional Justice: What Do We Know?*. 4 *The International Journal of Transitional Justice* 329. 2010.
- Patricia Lundy dan Mark McGovern. *Whose Justice? Rethinking Transitional Justice from the Bottom Up*. 35 *Journal of Law and Society* 265. 2008.

- Ratno Lukito. *Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*. 5 Undang: Jurnal Hukum 257. 2022.
- Ruti G. Teitel. *The Law and Politics of Contemporary Transitional Justice*. 38 Cornell International Law Journal 837. 2005.
- Ruti G. Teitel. *Theoretical and International Framework: Transitional Justice in New Era*. 26 Fordham International Law Journal 893. 2003.
- Suzannah Linton. *Cambodia, East Timor and Sierra Leone: Experiments in International Justice*. 12 Criminal Law Forum 185. 2001.
- Tessa V. Capeloto. *Reconciliation in the Wake of Tragedy: Cambodia's Extraordinary Chambers Undermines the Cambodian Constitution*. 17 Washington International Law Journal 103. 2008.

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

- Jiwon Suh. Disertasi: *The Politics of Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia*. Program Doktor Filsafat Ohio State University. Ohio. 2012.
- Ken Setiawan, Disertasi: *Promoting Human Rights: National Human Rights Commissions in Indonesia and Malaysia*. Leiden University. Leiden. 2013.
- Sri Lestari Wahyuningroem. Disertasi: *Democratisation and the Failure of Transitional Justice in Indonesia*. Program Doktor Filsafat Australian National University. Canberra. 2018.
- Suparman Marzuki. Disertasi: *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Reformasi Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2010.
- Veronica Sabrina Souto. Tesis: *Reconciliation and Transitional Justice: How to Deal with the Past and Build the Future*. Peace Operation Training Institute. Geneva. 2009.

Internet

- Ayomi Amidoni. *G30S: Perempuan dan Propaganda Terhadap Gerwani, 'Stigma Mereka Belum Hilang Sekalipun Mereka Sudah Tidak Diberi Label Lagi'*.

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 5 Mei 2024).
- Dian Erika Nurgaheny dan Icha Rastika. *Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Daftarnya...*
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11074071/jokowi-akui-12-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-ini-daftarnya?page=all> (diakses pada 4 Mei 2024).
- Ellen Emilie Stensrud. *The Politics of the ECCC: Lessons from Cambodia's Unique and Troubled Accountability Effort*. <https://www.justsecurity.org/83534/the-politics-of-eccc-lessons-from-cambodias-accountability-effort/> (diakses pada 3 Mei 2024).
- Erma Dwi Lidyawati. *Rekonsiliasi Korban G30S, Belajar dari Palu*.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu (diakses pada 5 Mei 2024).
- Heyder Affan. *Kisah Anak Algojo PKI di Blitar Selatan yang Mendampingi Penyintas Kasus 65: "Saya Minta Maaf"*.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49871541> (diakses pada 5 Mei 2024).
- Heyder Affan. *Mengungkap Kebenaran, Menggelar Rekonsiliasi*.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150922_indonesia_lapsus_rekonsiliasiakarrumput (diakses pada 5 Mei 2024).
- Kevin Boreham dan Harry Hobs. *Justice Denied for Cambodia*.
<https://eastasiaforum.org/2011/12/22/justice-denied-for-cambodia/> (diakses pada 3 Mei 2024).
- Kristian Erdianto. *Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI*.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/09480581/kronologi-engepungan-kantor-ylbhi?page=all> (diakses pada 4 Mei 2024).
- Kuch Naren. *Hun Sen Warns of Civil War if ECCC Goes Beyond 'Limit'*.
<https://english.cambodiadaily.com/news/hun-sen-warns-of-civil-war-if-eccc-goes-beyond-limit-78757/> (diakses pada 3 Mei 2024).

- Laporan Kontras Tahun 2006.
<https://www.kontras.org/backup/data/Matrix%20Putusan%20Pengadilan%20OHAM%20di%20Indonesia.html> (diakses pada 4 Mei 2024).
- Myra Torcheux. *Uncovering (Transitional) Justice in Post-Genocide Cambodian Diaspora*. <https://blogs.lse.ac.uk/seac/2023/01/26/uncovering-transitional-justice-in-the-post-genocide-cambodian-diaspora/> (diakses pada 22 Mei 2024).
- Rosemary Grey dan Rachel Killean. *Khmer Rouge Trial in Cambodia Comes to an End. What Now?*. <https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2022/09/27/khmer-rouge-war-crimes-trial-cambodia-law-expert-khieu-samphan.html> (diakses pada 3 Mei 2024).
- Nicole Cochran dan Andrew Wells-Dang. *Never Again? The Legacy of Cambodia's Khmer Rouge Tribunal*. <https://www.usip.org/publications/2022/10/never-again-legacy-cambodias-khmer-rouge-trials> (diakses pada 30 April 2024).
- Suriyanto. *Jokowi: Kalau PKI Muncul Gebuk Saja*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170517181121-20-215553/jokowi-kalau-pki-muncul-gebuk-saja> (diakses pada 4 Mei 2024).
- Tim Penulis. *Cambodia*. <https://www.britannica.com/place/Cambodia> (diakses pada 29 April 2024).
- Tim Penulis. Case Load. <https://www.eccc.gov.kh/en/case-load> (diakses pada 3 Mei 2024).
- Tim Penulis. *Documentation Center of Cambodia*. <https://www.dccam.org/> (diakses pada 30 April 2024).
- Tim Penulis. *Introduction to the ECCC*. <https://www.eccc.gov.kh/en/introduction-eccc> (diakses pada 3 Mei 2024).
- Tim Penulis. *Kasus 1965: Presiden Jokowi Akan Nyatakan 39 Eksil Bukan Pengkhianat Negara, 'Bagaimana dengan Para Korban di Indonesia'?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4pn219e1vo> (diakses pada 4 Mei 2024).

- Tim Penulis. *Luhut: Penyelenggara IPT 65 'Pikirannya Bukan Indonesia Lagi'*.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_luhut (diakses pada 4 Mei 2024).
- Tim Penulis. *Pengadilan Rakyat untuk Kasus 65 'Tidak Perlu Dilakukan'*.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_muhammadiyah (diakses pada 4 Mei 2024).
- Tim Penulis. *2021 Report on International Religious Freedom: Cambodia*.
<https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/cambodia/> (diakses pada 3 Mei 2024).
- Tim Penulis Cambodia Adrift. *Biography: Hun Sen*.
<https://projects.voanews.com/cambodia-election-2018/english/biography/hun-sen.html> (diakses pada 30 April 2024).
- Tim Penulis Cambodian Genocide Program. *Cambodian Genocide Program*.
<https://gsp.yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program> (diakses pada 26 Maret 2024).
- Tim United States Institute for Peace, *Social Reconstruction*,
<https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/social-well-being/social-reconst#1083> (diakses pada 20 Mei 2024).

Pustaka tidak dipublikasi

- Adnan Buyung Nasution. *Towards Constitutional Democracy in Indonesia*, Makalah Seminar Southeast Asian Constitutionalism. 2010. tidak dipublikasi.
- Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012: Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-1966. 2012. tidak dipublikasi.
- Mathias Buhler dan Andreas Madestam. *State Repression, Exit, and Voice: Living in the Shadow of Cambodia's Killing Fields*. Konferensi ECONSTOR. Madrid. 2023, tidak dipublikasi.
- Rama Mani. *Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War*. Malden. Polity. 2002, tidak dipublikasi.